

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Astrid Anugrah, SH. (2009). *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*. Jakarta Timur: Pancuran Alam Jakarta.
- Astuti, Tri Mathaeni Pudji, 2011. *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*. Semarang: UNNES Press.
- Budiarjo, Miriam. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Diah Y. Sudareja & Syafrizaldi Jpang. (2019). *Perempuan di Singgasana Lelaki*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T Kansil. (2007). *Ilmu Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Iwan Satriawan & Ade Arif Firmansyah. (2019). *Dinamika Keterwakilan Perempuan Dalam Politik: Konstelasi Teoritik dan Tantangan ke Depan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Meleong, L.J. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mose, J. C. 2007. *Gender & Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Schorder, Peter. (2000). *Strategi Politik, Edisi Revisi Pemilu 2009. Terjemahan oleh Matinda (Meleong, L,J, 2016), Denise Jooyce. & Dayasih, Irna. 2008*. Jakarta: Friedrich-Naumann-Shiftung fuer die Freiheit.
- Schorder, Peter.. (2008). *Strategi Politik*. Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung, PT Mita Alembana Grafika.
- Sunardjo, Unang. 2004. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung : Tarsito

2. JURNAL

- Adeni, S., & Harahap, M. A. (2018). Komunikasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Dalam Arena Politik. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, 1(2).
- Akbar, A. R. Problematika Keterwakilan Perempuan Di Dprd Kota Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Kemasyarakatanegaraan*, 4(7).
- Ardiansa, D. (2017). Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia. *Jurnal Politik*, 2(1), 71-99.
- Artina, D. (2016). Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(1), 123-141.

- Boro, V. I. A., & Kale, A. E. T. (2020). Keterwakilan Perempuan di Ranah Lokal: Studi Kasus di Kecamatan Boawae, Nusa Tenggara Timur dalam Pemilu Legislatif 2014. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 115-130.
- Budiarti, A. (2011). Bayang-bayang Afirmasi Keterwakilan Perempuan di Parlemen Indonesia. *Studi Politik*, (2), 97-112.
- Budiarti, P. A. (2012). Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Masyarakat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Masyarakat Daerah (DPRRI dan DPRD). *Widyariset*, 15(1), 19-28.
- Demartoto, A. (2005). Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel.
- Dewi, M. A., & Ilkodar, S. B. (2008). Implikasi Peningkatan Keterwakilan Perempuan bagi Pemenuhan Kepentingan Perempuan (Studi pada DPRD Provinsi DIY). *Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, 21(1), 98-99.
- Ekawati, E. (2018). Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Pasca Orde Baru. *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 16(1), 67-80.
- Farhah, I. A. (2019). Partai Politik dan Keterwakilan Perempuan (Analisis Problematika Partai Politik dalam Memenuhi Keterwakilan Perempuan di DPRD). *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 14(1), 75-83.
- Fitriyah, F. (2018). Politik Dinasti Pada Kandidasi Perempuan dalam Pilkada Serentak 2015 di Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Sosial*, 17(1), 39-52.
- Hidayatulloh, B. A. (2020). Implementasi Sistem Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu: Studi pada Masyarakat Patrilineal di Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 3(1).
- Jovani, A. (2018). Potret Keterwakilan Politik Perempuan Anggota Legislatif di DPRD NTT Pada Pemilu 2014. *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar*, 1(1), 75-93.
- Julita, E. N., Mursalin, A., & Najib, K. (2020). *KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILU LEGISLATIF KABUPATEN TEBO PERIODE 2019-2024* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Kiptiah, M. (2019). Motivasi Keterwakilan Perempuan dalam Politik Pada Pemilu Legislatif Di Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Humaniora Teknologi*, 5(1), 13-18.
- Mardiana, M., Miranti, M., & Maryam, S. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya Keterwakilan perempuan pada pemerintahan Desa Tambun Arang. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 1(1), 30-39.

- Marlena, H. (2019). Analisis Keterwakilan Perempuan Di DPRD Seluma (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu). *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik (JMPKP)*, 1(1), 63-75.
- Mukarom, Z. (2008). Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif. *MediaTor: Jurnal Komunikasi*, 9(2), 257-270.
- Pradipta, H. R. (2018). Keterwakilan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Berdasarkan Fungsi DPRD di Kota Semarang Periode 2014-2019. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(2), 171-180.
- Raqim, U. (2016). *Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Salatiga* (Doctoral dissertation, Universitas Negara Semarang).
- Salim, C. Dinamika Politik Perempuan dalam Kontestasi Pilkada di Provinsi Lampung. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 3, 287-305.
- Sarifah, H. (2015). *Persepsi Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan (Studi Kasus Desa Grogol Beningsari Dan Desa Petanahan, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen)* (Doctoral Dissertation, Universitas Negara Semarang).
- Sholikin, A. (2016). Representasi Politik Perempuan Dalam Pilkada Serentak 2015 Di Indonesia. *Jrp (Jurnal Review Politik)*, 6(2).
- Subiantoro, E. B. (2014). Masa Depan Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014. *Jurnal Perempuan*, (79).
- Tridewiyanti, K. (2012). Kesetaraan Dan Keadilan Gender Di Bidang Politik “Pentingnya Partisipasi Dan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif”(Gender Equality And Justice In Field Of Politics “The Importance Of Participation And Representation Of Wower In Legislative”). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(1), 73-90.
- UII, P. S. H. K. F. (2016). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 terhadap Kebijakan Affirmative Action Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi dan kabupaten/kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Konstitusi*, 7(6), 225-290.
- Usman, N. A. (2012). Potret Keterwakilan Perempuan dalam Pemerintahan di Aceh. *Jurnal Perempuan*, 17(4), 39-55.
- Warjiyati, S. (2016). Partisipasi politik perempuan perspektif hukum Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 6(1), 1-27.

3. DOKUMEN

Monografi Desa Karangrahayu Kecamatan Karangbahagia

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa Tahun 2014

Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang No. 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita

UU No 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Terhadap Perempuan

4. WEBSITE

Adam, Rainer. 2006. Strategi Politik. (Online), (<http://www.ForumPolitisi.org>, diakses
19 November 2009).

<http://kbbi.website.id/Perempuan>

Infopemilu.kpu.go.id

